

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah di Indonesia memiliki fungsi dalam mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, segala potensi dan sumber daya yang ada harus dialokasikan secara efektif dan efisien secara terus-menerus sehingga pembangunan nasional dapat terwujud. Hal ini terlihat pada pemerintah pusat melalui otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri.

Dengan munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintah bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan terhadap daerah dalam mewujudkan daerah otonomi yang bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut.

Pemberian otonomi daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat serta peningkatan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan langkah pemerintah pusat dalam memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah yang merupakan peluang sekaligus tantangan. Menjadi sebuah peluang apabila pemerintah daerah tersebut mampu mengelola segala sumber penerimaan dengan baik dan optimal, begitupun

sebaliknya akan menjadi sebuah tantangan apabila pemerintah tersebut tidak mampu mengelola segala sumber penerimaan daerahnya dengan baik.

Permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah selain perimbangan keuangan antar pusat dan daerah yang kurang merata, prospek kemampuan pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan dan pelayanan masyarakat dianggap belum maksimal. Oleh karena itu, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan juga akan bertambah. Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa diupayakan secara periodik oleh setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan yang ditetapkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan.

Pembiayaan pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Namun yang menjadi komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat Terdapat banyak fasilitas penunjang yang dimiliki oleh Kota Padang yang menjadikannya sebagai kota yang memiliki jalur perdagangan darat maupun laut di antaranya adalah

Bandara Internasional Minangkabau dan Pelabuhan Teluk Bayur. Fasilitas inilah yang menunjang lancarnya jalur perdagangan sehingga industri di Padang semakin hari semakin meningkat. Adanya peningkatan pada sektor industri, perdagangan dan jasa yang disebabkan oleh tunjangan fasilitas tersebut maka wadah untuk pemasaran produk pun semakin banyak dibutuhkan, tidak hanya lewat media cetak, media elektronik juga semakin marak dibutuhkan.

Lahirnya media baik cetak dan elektronik, dijadikan sebagai modal besar untuk para pengguna sektor perdagangan, salah satu yang paling diminati adalah pemasaran lewat media reklame. Media reklame dianggap sebagai alternatif pemasaran yang menguntungkan dan sangat efektif, reklame dianggap mampu menarik calon konsumen karena reklame bisa diakses oleh semua pihak. Hal ini menjadikan reklame sebagai salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah, baik dalam hal pemberian aturan dan tarif pemasangan reklame yang diatur oleh undang-undang maupun peraturan daerah. Pajak Reklame dapat memberikan kontribusi tersendiri terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga pemerintah diharap dapat mengoptimalkan objek pajak ini guna menambah pendapatan asli daerah (PAD) yang akan di gunakan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan dan membiayai pembangunan.

Efektifitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo,2022). Target penerimaan pajak untuk tahun berikutnya didapatkan dengan melihat data realisasi tahun lalu dan kemudian dilakukan pendataan lagi terhadap wajib pajak

yang baru untuk menghitung estimasi pajaknya. Penelitian ini sangat penting untuk melihat efektifitas pemungutan pajak reklame pada Kota Padang.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji tentang “ANALISIS EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG” sebagai judul dalam tugas akhir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah ini adalah “apakah pemungutan pajak reklame terhadap pendapatan daerah di kota Padang sudah efektif?”

1.3 Tujuan Magang

1.3.1. Tujuan Khusus

Untuk mendapatkan gambaran besarnya efektifitas pemungutan pajak reklame di Kota Padang.

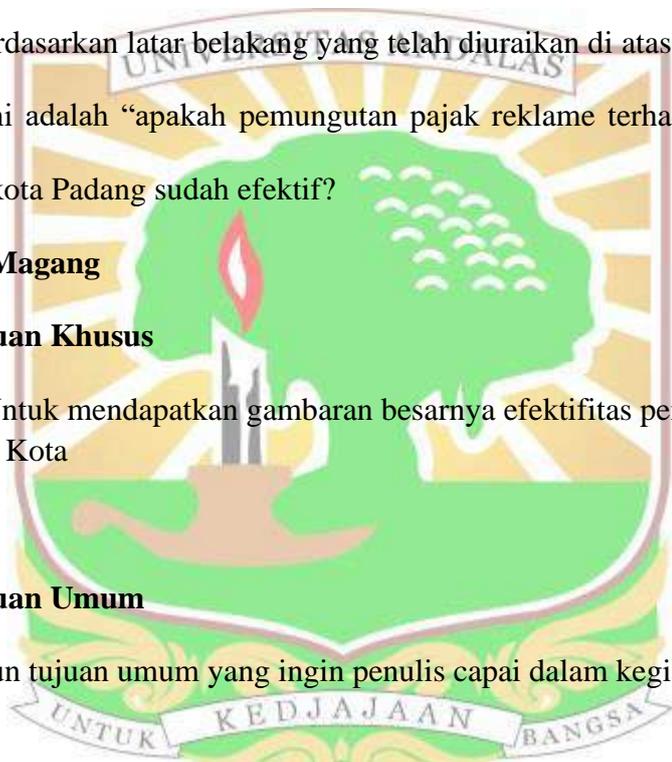
1.3.2. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum yang ingin penulis capai dalam kegiatan magang ini adalah:

1. Melengkapi SKS sesuai dengan yang ditetapkan sebagai syarat kelulusan

Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

2. Memberikan wawasan bagi penulis yang akan dikembangkan menjadi sebuah topik dalam pembuatan Tugas Akhir sebagai persyaratan kelulusan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.



1.4 Manfaat Penulisan

Dengan adanya penyusunan tugas akhir ini, penulis berharap akan ada manfaat yang diambil oleh berbagai pihak sebagai berikut

1. Bagi Penulis

- a) Merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya pada Universitas Andalas

- b) Menambah wawasan dan pengetahuan penulis

- c) Untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dunia kerja dan menerapkan ilmu-ilmu secara teori yang diperoleh di bangku perkuliahan

2. Bagi Universitas Andalas

- a) Dapat dijadikan sebagai tambahan referensi di perpustakaan Universitas Andalas pada umumnya dan Program Diploma III Fakultas Ekonomi pada khususnya

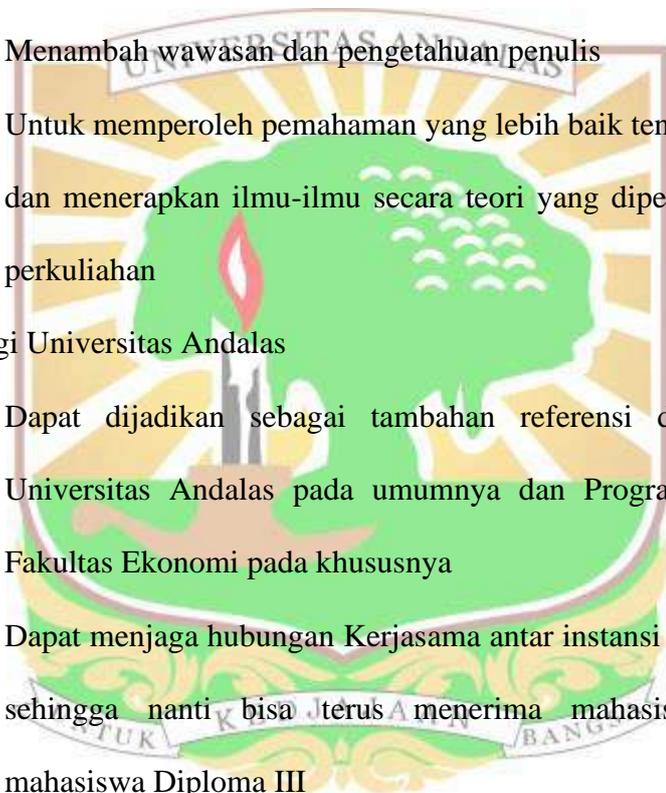
- b) Dapat menjaga hubungan Kerjasama antar instansi atau perusahaan sehingga nanti bisa terus menerima mahasiswa khususnya mahasiswa Diploma III

Fakultas Ekonomi Universitas Andalas untuk terus magang di instansi mereka

3. Bagi Pembaca

- a) Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang bermaksud mengadakan penelitian yang sama.

- b) Memberikan motivasi dan gambaran umum kepada pembaca dalam



menentukan topik penelitian.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan ini penulis mengumpulkan data dengan metode pengumpulan sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

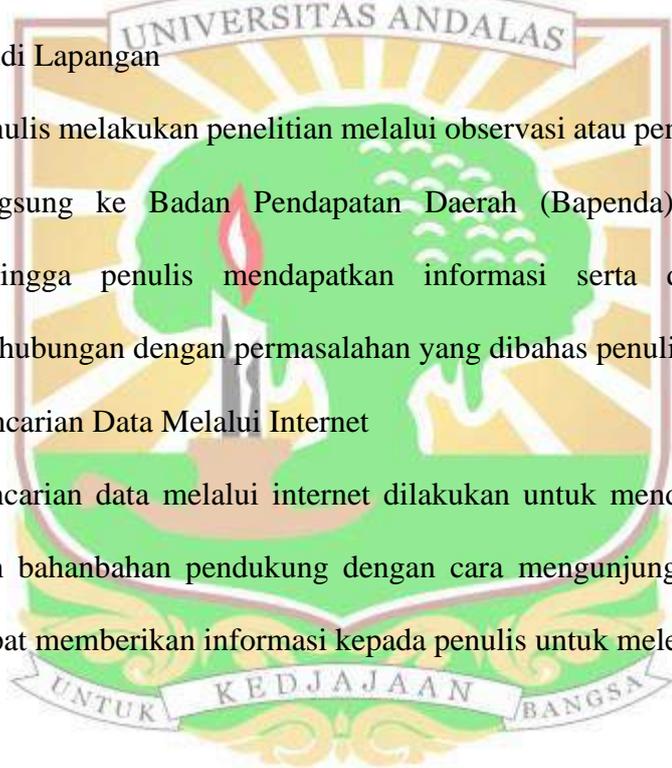
Penulis mempelajari, mencari dan mengumpulkan data dari buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas penulis.

2. Studi Lapangan

Penulis melakukan penelitian melalui observasi atau pengamatan secara langsung ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang sehingga penulis mendapatkan informasi serta data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas penulis.

3. Pencarian Data Melalui Internet

Pencarian data melalui internet dilakukan untuk mendapatkan materi dan bahanbahan pendukung dengan cara mengunjungi website yang dapat memberikan informasi kepada penulis untuk melengkapi data.



1.6 Tempat dan waktu magang

Kegiatan magang ini dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang yang terletak di Jl. Moh Yamin, Kp.Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Kegiatan magang ini dilaksanakan dalam kurun waktu 40 hari kerja dimulai pada tanggal 21

Februari 2022 s/d 14 April 2022 yakni hari Senin s/d jumat pukul (08.00-15.00).

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika yang penulis gunakan dalam penyusunan laporan ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang penulis dalam pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

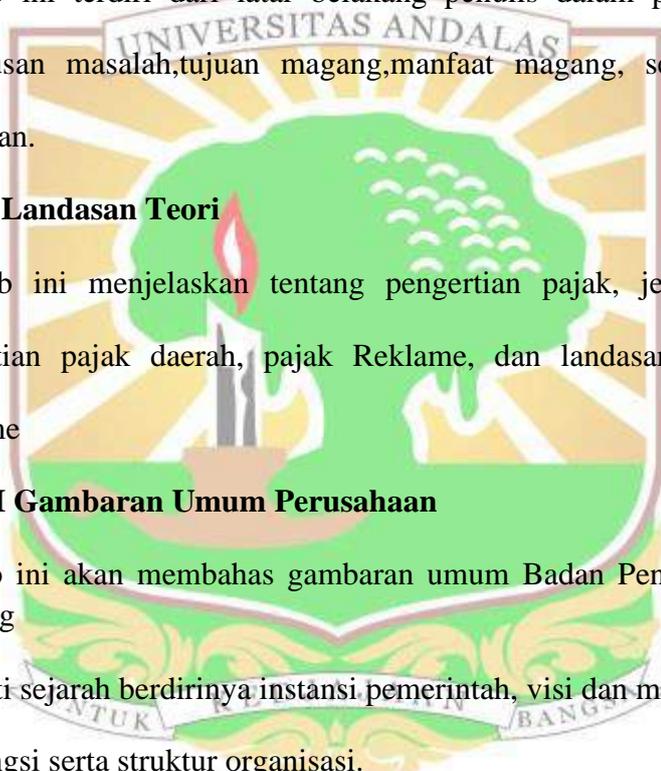
Bab ini menjelaskan tentang pengertian pajak, jenis-jenis pajak, pengertian pajak daerah, pajak Reklame, dan landasan hukum pajak Reklame

Bab III Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini akan membahas gambaran umum Badan Pendapatan Daerah yang meliputi sejarah berdirinya instansi pemerintah, visi dan misi, tugas pokok, dan fungsi serta struktur organisasi.

Bab IV Pembahasan

Bab ini penulis akan membahas tentang Potensi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang, kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang



Bab V Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh pembahasan dengan menarik kesimpulan atas jawaban permasalahan serta dalam bab ini juga akan memberikan saran yang relevan sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan.

